

## Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari

Adrian Tawai <sup>1,\*</sup>; Zamran Afriadi<sup>2</sup> ; Muhammad Yusuf <sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Halu Oelo, Kendari, Indonesia; [adriantawai@uho.ac.id](mailto:adriantawai@uho.ac.id)

\*Correspondence : [adriantawai@uho.ac.id](mailto:adriantawai@uho.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan model implementasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari, serta faktor-faktor yang mempengaruhi model implementasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari laporan di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan 6 informan untuk memperoleh data mengenai informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam upaya pelaksanaan masih kurang efisien. Masih ada sebagian kasus serta hambatan antara lain belum optimalnya akses jalannya JKN di tiap Puskesmas, belum optimalnya sosialisasi JKN ke warga, belum optimalnya pemanfaatan akses data, dan belum optimalnya penerapan sistem referensi serta pembayaran pada jasa program JKN.

### ABSTRACT

This study aims to determine and the implementation model of the national health insurance program (JKN) at the Kendari City Health Office, as well as the factors that influence the implementation model of the national health insurance program (JKN) at the Kendari City Health Office. This type of research is descriptive qualitative. Primary data sources are obtained directly through observation, interviews and documentation. Secondary data was obtained from reports at the Kendari City Health Office. In this study, researchers determined 6 informants to obtain data on informants in this study are people who have the potential to provide information about the National Health Insurance Program (JKN) Implementation Model at the Kendari City Health Office. Data analysis using the Miles and Huberman model, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing / verification. The results showed that the implementation of the JKN program at the Kendari City Health Office in an effort to implement it was still inefficient. There are still some cases and obstacles, including not optimal access to JKN roads in each Puskesmas, not optimal socialization of JKN to residents, not optimal utilization of data access, and not optimal application of reference systems and payments for JKN program services.

### Kata kunci

*Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Pemerintah*

### Keywords

*Program Implementation, National Health Insurance, Government Policy.*

## Pendahuluan

Menurut UUD 1945, Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai kepala Negara, pemerintah dituntut untuk melayani semua kepentingan publik, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan hak-hak sipil. Dengan kata lain, semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang diwajibkan oleh hukum atau panggilan untuk penyediaan semacam layanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendeskripsikan bahwa kesehatan adalah kondisi dimana manusia sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga secara sosial ekonomi mampu menjalani kehidupan yang produktif. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar yang diberikan kepada individu sejak lahir. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap orang Indonesia. Jadi, dalam hal ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa hak-hak yang lebih rendah tersebut ditegakkan. Untuk memperkuat peran pelayanan kesehatan primer, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan dan regulasi. Dalam proses ini, mereka melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan mudah dijangkau oleh semua orang (Rosnah & Kasim, 2022).

Salah satu jenis pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat adalah di bidang kesehatan. Tidak mengherankan jika industri kesehatan harus terus ditingkatkan untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Layanan yang dimaksud tentu saja cepat, akurat, terjangkau, dan ramah. Mengingat bahwa masyarakat yang sehat jasmani dan rohani akan dapat membantu suatu negara dalam melaksanakan pembangunannya secara tepat. Meskipun tidak semua masyarakat mendapatkan biaya kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, bagi mereka yang tidak mampu, pemerintah menyediakan asuransi kesehatan untuk menanggung biaya kesehatan mereka (Suprianto & Mutiarin, 2017).

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tengah dinamika sistem kesehatan Indonesia, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai akses kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu kota di Indonesia yang berupaya mengimplementasikan Program JKN dengan baik adalah Kota Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan program ini dengan optimal. Pengelolaan dan implementasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menyediakan akses kesehatan yang adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil oleh

pemerintah memiliki efektivitas yang baik di lapangan dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Djiko & H. S. Tangkau, 2018). Terkadang kegagalan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan optimal di tengah masyarakat (A. Mandolang et al., 2019).

Di sisi lain, mereka yang tidak mampu membayar asuransi dapat menggunakan program lain seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah. Namun sistem jaminan sosial tersebut belum berjalan dengan baik dan efisien, sesuai Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menghadapi tantangan yang sulit, biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan (Driss, 2017).

Beranjak dari ini Pemerintah dan rumah sakit komersial dan fasilitas kesehatan di Indonesia terus bekerja untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien dan keluarganya. Dalam konteks ini, faktor-faktor kunci seperti kerjasama dengan pihak terkait, peran serta masyarakat, manajemen sumber daya, dan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan akan menjadi perhatian utama. Selain itu, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini juga akan dijelaskan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan Program JKN di Kota Kendari. Telah banyak studi yang membahas mengenai implementasi program JKN seperti studi Hasanah (2016). yang mengambil wilayah penelitian di Puskesmas Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan serta Rosmawati, & Nilwana, (2018) yang mengambil wilayah di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang. Dari studi-studi tersebut belum ada yang mengambil studi di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari.

## Metode

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari, pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini adalah terdapat hal-hal yang layak diteliti. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Pada penelitian kualitatif ini peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Peneliti dalam penelitian ini menunjuk narasumber untuk mengumpulkan informasi tentang informan yang mungkin memiliki pengetahuan tentang Model pelaksanaan program Jaminan JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Informan adalah pihak atau individu yang memiliki pemahaman yang unggul tentang hal atau keadaan sosial yang sedang diteliti, atau mereka berfungsi sebagai otoritas yang memfasilitasi penyelidikan bagi peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan untuk memperoleh data mengenai Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Adapun yang menjadi informan penelitian ini terdiri dari: Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola JKN Dinas Kesehatan, Tenaga/petugas Kesehatan dan Masyarakat tiga orang. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles, Huberman 1994; Ramdani, Nasir, & Sudirman, 2021). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai selesai.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari

Dalam upaya memajukan sebesar-besarnya potensi kesejahteraan masyarakat, program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan publik yang menysasar penduduk Kota Kendari sebagai kelompok sasarannya dan juga merupakan kebijakan publik di bidang kesehatan. Target audiens untuk kebijakan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam menjalankan Program Jaminan Nasional ini menjadi bukti lebih lanjut bagaimana Pemerintah Kota Kendari telah memaksimalkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat. Semakin banyak diakui bahwa melibatkan pemangku kepentingan adalah faktor krusial untuk mencapai keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program yang berkelanjutan (Freebairn et al., 2022).

Mewujudkan Masyarakat Kota Kendari yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera merupakan tujuan utama Dinas Kesehatan Kota Kendari. Tak perlu dikatakan bahwa memeriksa situasi yang ada dan kemudian membuat rencana tindakan yang mendukung tujuan adalah langkah pertama dalam mewujudkan visi tersebut. Setelah kebijakan program jaminan kesehatan nasional ini ditetapkan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian adalah menggerakkan secara efektif kapasitas lembaga atau lembaga pelaksana, khususnya bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan sebenarnya.

Proses implementasi baru akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun secara terinci, dan dana yang diperlukan telah tersedia dan dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut (Andani et al., 2019). Tahapan implementasi memiliki kepentingan yang besar karena suatu kebijakan atau program tidak memiliki makna apapun jika tidak dapat dijalankan dengan baik dan tepat (Amieratunnisa & Indarjo, 2018). Pada titik ini diputuskan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh seberapa baik pelaksanaannya. Karena untuk mendapatkan efek yang diinginkan atau mencapai tujuan, program kebijakan

harus dijalankan. Oleh karena itu, mengingat temuan studi yang paling penting di daerah tersebut, peneliti juga mengkaji beberapa variabel yang mungkin berdampak pada pelaksanaan program (JKN) ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menurut Charles O.Jones tentang 3 variabel implementasi program sebagai berikut.

#### **a. Pengorganisasian**

Terbentuknya visi, maksud, dan tujuan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam rangka program jaminan kesehatan nasional tidak terlepas dari organisasi ini. Kelompok ini berkepentingan dengan siapa dan apa yang harus dilakukan. Saat membuat kebijakan organisasi, penting untuk mempertimbangkan perumusan visi, misi, dan tujuan. Pernyataan misi Dinas Kesehatan Kota Kendari, "Mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat, mandiri, dan sejahtera" cukup spesifik. Dinas Kesehatan serius dan peduli untuk mewujudkan masyarakat di Kota Kendari yang sehat, mandiri, dan sukses, yang tercermin dari tujuan tersebut. Dari visi tersebut kemudian dibuat misi dengan harapan tercapainya tujuan yaitu implementasi. Penting untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan peluang dan tantangan yang muncul, daripada mengikat diri secara kaku pada rencana implementasi program yang telah ditetapkan sebelumnya (Bandali et al., 2022). Dinas Kesehatan terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan kebijakan program jaminan kesehatan nasional.

#### **b. Penerapan**

Dengan melaksanakan kegiatan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan kebijakan, semua keputusan dan peraturan diterapkan secara konsisten. Kebijakan program JKN dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai keadaan kesehatan yang baik. Kebijakan JKN memiliki ciri-ciri yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui penyediaan jaminan pelayanan Kesehatan (Agussalim et al., 2017). Program yang ada saat ini memerlukan perhatian khusus pada JKN dan menjangkau yang tidak terjangkau. Penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan isu-isu terkait kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan, dan jaminan pelayanan Kesehatan. keberhasilan pelaksanaan JKN adalah menjangkau mereka yang tidak terjangkau, dengan kata lain tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari tidak sepenuhnya didasarkan pada segi kuantitatif, melainkan agak kualitatif. Secara khusus, seberapa baik program JKN diimplementasikan akan tergantung pada seberapa baik istilah "ketidakterjangkauan" itu sendiri dapat didefinisikan. Namun dalam implementasinya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan (Sudrajat et al., 2020) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang terkait dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup masalah kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan, dan jaminan pelayanan kesehatan. Meskipun pengimplementasian kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan

lancar, masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan program tersebut (Listiani et al., 2022).

### **c. Interpretasi**

Tujuan interpretasi adalah untuk memahami apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan terhadap program JKN dan untuk mengetahui dengan tepat apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai atau dicapai. Pengambil keputusan harus menyadari kewajibannya agar tindakan pelaksana program JKN dapat diprediksi. Hal ini akan memungkinkan pelaksana kebijakan untuk memahami dengan tepat tujuan yang ingin dicapai. Kunci keberhasilan implementasi adalah adanya keselarasan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan yang sesungguhnya dari kelompok sasaran (Fatonah et al., 2021).

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

### **a. Komunikasi**

Efektifitas pembentukan JKN bergantung pada komunikasi, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Dalam implementasi suatu program atau kebijakan, peran komunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program tersebut (Gurusinga & Sujianto, 2023). Ketika pembuat keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan, implementasi menjadi efektif. Pelaksanaan program harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat agar efektif karena komunikasi yang baik memungkinkan masyarakat merencanakan tindakannya. Selain itu, kebijakan yang diberikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Pembuat kebijakan dan pelaksana program membutuhkan komunikasi untuk memastikan konsistensi dalam cara setiap program dijalankan untuk mencapai tujuannya.

Meskipun pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional telah berjalan cukup baik, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari Program JKN yang telah dibuat oleh pemerintah. Kendala ini muncul karena kurangnya sumber daya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait Program JKN. Pemerintah perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka mampu berhasil melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Listiani et al., 2022).

### **b. Sumberdaya**

Sumber daya dalam suatu organisasi dipandang sebagai input dalam sistem yang memiliki implikasi ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya terkait dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau manfaat potensial ketika diubah menjadi output. Sementara itu, secara teknologis, sumber daya terkait dengan kemampuan transformasi yang dimiliki oleh organisasi (Agussalim et al., 2017). Agar suatu kebijakan atau program JKN berhasil dilaksanakan di Kota Kendari, maka harus

didukung dengan tersedianya sumberdaya yang dapat memberikan pengaruh yang baik dan bermanfaat. Tentu saja, memiliki sumberdaya yang cukup sangat penting untuk menerapkan kebijakan dan memastikan keberhasilan, efektivitas, dan efisiensinya. Jika sumberdaya manusia yang cukup terampil dipekerjakan untuk melaksanakan eksekusi kebijakan, semuanya akan berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Tentunya hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengeksekusi suatu kebijakan dan sesuai dengan kemampuannya.

Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat vital, yang mencakup staf atau petugas pelaksana yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas, pengaturan wewenang yang efektif, serta fasilitas yang diperlukan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan efisien (A. Mandolang et al., 2019).

### **c. Disposisi**

Disposisi merujuk pada kecenderungan mereka atau suatu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif (Agussalim et al., 2017). Temperamen atau sikap individu yang menjalankan kebijakan publik sangat mempengaruhi bagaimana hal itu dilakukan.

Disposisi mencerminkan karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Ini adalah informan yang memberikan wawasan tentang bagaimana sikap, sikap mental, atau kecenderungan pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program tersebut (Amieratunnisa & Indarjo, 2018). Implementasi kebijakan yang efektif menuntut para pelaksana untuk tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu melakukannya, menjamin tidak ada bias dalam implementasi nyata.

Sikap positif terhadap kebijakan tertentu di antara para pelaksana menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat keputusan awal. Sebaliknya, proses adopsi suatu kebijakan akan lebih menantang jika tindakan atau sudut pandang pelaksana menyimpang dari pengambil keputusan. Terwujudnya implementasi kebijakan yang sejalan dengan maksud atau tujuan sangat tergantung pada kecenderungan perilaku atau kualitas para pelaksana kebijakan. Tingkat kejujuran dan pengabdian yang tinggi diperlukan bagi para pelaksana kebijakan. Komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan akan membuat mereka terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab, wewenang, fungsi, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kejujuran menumbuhkan kepatuhan terhadap gagasan program yang telah dibuat. Cara pelaksanaan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana. Pandangan yang optimis akan membantu pelaksana menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan pembuat kebijakan. Implementasi tidak akan berhasil jika tidak demikian. Dinas Kesehatan Kota Kendari, menurut laporan tersebut, mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mendukung proses implementasi agar berjalan dengan baik. Struktur birokrasi mencakup tata cara organisasi, pembagian tugas, hirarki, dan saluran komunikasi di dalam suatu lembaga atau instansi. Struktur yang baik akan memastikan adanya arahan yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan aliran informasi yang lancar, sehingga membantu kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program (Pambudi, 2019). Struktur organisasi pelaksana mencakup seberapa besar rentang kendali atau wewenang yang dimiliki oleh pimpinan dan bawahan di dalamnya. Hal ini mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan bagi setiap pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan (A. Mandolang et al., 2019).

Cara kebijakan diimplementasikan secara signifikan dipengaruhi oleh organisasi birokrasi. Salah satu aspek struktur penting dalam setiap organisasi adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai panduan bagi setiap pelaksana dalam melakukan tindakan atau menjalankan tugasnya (Pambudi, 2019). Operasi dan struktur birokrasi itu sendiri tercakup dalam komponen struktur birokrasi ini. Yang pertama adalah metodenya; biasanya, Prosedur Operasional Standar dikembangkan untuk menerapkan kebijakan. Setiap pelaksana harus mengikuti SOP sebagai panduan untuk memastikan bahwa mereka berperilaku dengan cara yang tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu ekstensif dan terfragmentasi cenderung melemahkan pengawasan dan mengakibatkan proses birokrasi yang berbelit-belit dan sulit, yang pada gilirannya membuat aktivitas organisasi menjadi kaku.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP).

#### Kesimpulan

Dalam hal apa yang dapat sejalan dengan temuan diskusi berdasarkan fakta penelitian, kesimpulan tersebut adalah: Pengorganisasian, Keberhasilan organisasi Dinas Kesehatan dapat dikaitkan dengan efek menguntungkan pada lingkungan. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh upaya sosialisasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan JKN. Selain itu, karena kebijakan JKN merupakan tugas bersama, maka Dinas Kesehatan bekerjasama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, camat, lurah, dan seluruh UPTD Puskesmas se Kota Kendari. Penerapan, Kebijakan program JKN Kota Kendari

hanya berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, itu pun sangat menyimpang dari gagasan utama kebijakan JKN, yaitu mengikuti setiap undang-undang atau peraturan yang ditetapkan pemerintah. Interpretasi, yaitu menerjemahkan kebijakan program JKN ke dalam rencana dan arahan yang wajar, diterima, dan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Oleh karena itu, permasalahan Model implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Kendari belum memuaskan atau efektif, namun implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan proses yang membutuhkan upaya yang terkoordinasi.

## Referensi

- A. Mandolang, Y., Daicy Lengkong, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1–8.
- Agussalim, Hermiyanti, & Rahman, A. (2017). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) UNDATA Palu. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 3(1), 1–84.
- Amieratunnisa, A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(1), 69–79.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Bandali, S., Style, S., Thiam, L., Omar, O. A., Sabino, A., & Hukin, E. (2022). Pathways of change for achieving sustainability results: A tool to facilitate adaptive programming. *Global Public Health*, 17(3), 457–468. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1868016>
- Djiko, R., & H. S. Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 109–120. <https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738>
- Driss, B. (2017). GATS and International Trade in Health Services: Impact and Regulations. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1050>
- Fatonah, K., Alfian, A., & Lestari, S. (2021). Implementasi Program Kampus Mengajar Di Sekolah Dasar Swasta Nurani Jakarta. *JS (JURNAL SEKOLAH)*, 5(4), 194. <https://doi.org/10.24114/js.v5i4.31326>
- Freebairn, L., Song, Y. J. C., Occhipinti, J.-A., Huntley, S., Dudgeon, P., Robotham, J., Lee, G. Y., Hockey, S., Gallop, G., & Hickie, I. B. (2022). Applying systems approaches to stakeholder and community engagement and knowledge

- mobilisation in youth mental health system modelling. *International Journal of Mental Health Systems*, 16(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s13033-022-00530-1>
- Gurusinga, M. O., & Sujianto. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cross-Border*, 6(1), 305–314.
- Hasanah, U. (2016). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pemberian Bantuaniuran di Puskesmas Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 4(1).
- Listiani, R., Pebriyanti, A., Fawwaz, M., & Istanti, N. D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional : a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 645–652. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/9248>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Pambudi, L. S. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), 205.
- Ramdani, W. N. R., Nasir, M., & Sudirman, F. A. (2021). Implementasi Aplikasi SiCANTIK pada Dinas PMPTSP Kota Kendari : Tinjauan E-Government. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305>
- Rosnah, & Syaifudin Suhri Kasim. (2022). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Masa Pandemi Covid - 19. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.6>
- Rosmawati, H. D., & Nilwana, A. (2018). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*.
- Sudrajat, T., Kunarti, S., & Nasihuddin, A. A. (2020). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 83–92. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>
- Suprianto, A., & Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 71–107. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4172>